



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA TARAKAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2026.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2025 disamping mengoptimalkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan baru sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tarakan dimana terdapat perubahan atas struktur organisasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Tarakan, Februari 2025
Kepala Dinas

dr. Witoyo
NIP. 19650111 200012 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator	31
3.3. Program dan Kegiatan	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	36
BAB V PENUTUP	39



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika, maka disusunlah Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan sistem kerja yang terintegrasi dan handal dengan didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan.



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 Kota Tarakan sebagai berikut :

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban .

1.3.2 TUJUAN

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD .

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja .



BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal OPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan .

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai rencana kerja yang dilakukan Perangkat Daerah dalam Langkah mencapai target yang ditetapkan serta berisi rumusan Rencana Progra/Kegiatan/Sub Kegiatan .

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut .

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi .

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya .

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya .

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data Evaluasi Renja, Laporan Konsolidasi dan LRA 2023 .

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 6.981.387.107,00** dengan realisasi sebesar **Rp 6.705.604.815,00** atau **96,05 %** .

Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang tidak terlaksana atau tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : **1 (satu) Sub Kegiatan**, terdapat 1 Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Statistik dan Persandian . Adapun alasan tidak terlaksananya kegiatan tersebut karena terkendala koordinasi dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) Dimana pada saat pengajuan nara sumber kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pengamanan Informasi .

Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi



- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
- ❖ Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
3. Program Aplikasi Informatika
- ❖ Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - ❖ Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - ❖ Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Faktor - faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya atau terlampauinya target kinerja program / kegiatan / sub kegiatan ;

- Komitmen dan dukungan yang tinggi dari seluruh stake holder untuk mewujudkan *smart city*
- Didukung oleh SDM aparatur bidang teknis yang cukup
- Adanya kebijakan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang selaras dengan pengembangan layanan publik berbasis teknologi informasi.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah akibat tercapainya target kinerja program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan kegiatan adalah terpenuhinya capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan terhadap Target Renstra Perangkat Daerah;



Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan tersebut :

- Merencanakan target serta memaksimalkan pelaksanaan Realisasi Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan pada Semester I, untuk mempercepat penyerapan APBD dan menghindari keterlambatan administrasi kegiatan;
- Memaksimalkan monitoring dan evaluasi rencana kerja serta target bulanan / triwulanan yang telah direncanakan;
- Merencanakan indikator dan target kinerja program / kegiatan / sub kegiatan sesuai dengan penganggaran;

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023 Kota Tarakan dapat di lihat pada Tabel T-C.29



Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*
Kota Tarakan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		
			Target	Satuan	Target	Satuan	Target Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target	Satuan	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024			
							Target	Satuan				Realisasi	Satuan	Realisasi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)					
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	
2 16 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	100	1	dok	1	dok
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	dok	1	dok	1	dok	1	dok	100	1	dok	1	dok
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan yang terselesaikan tepat waktu.	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	orang	29	orang	29	orang	28	orang	96.55	29	orang	28	orang
2 16 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dok	9	orang	12	dok	12	dok	100	12	dok	12	dok
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	100	persen	100	persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	5	Paket	5	Jenis	5	Paket	5	Paket	100	5	Paket	5	Paket
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	Paket	40	Jenis	34	Paket	34	Paket	100	35	Paket	38	Paket
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	3	Jenis	3	Paket	3	Paket	100	3	Paket	3	Paket
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	4	Kali	5	Laporan	5	Laporan	100	4	Laporan	5	Laporan
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	2	Jenis	-	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	-	2	Jenis	3	Jenis
2 16 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2	Unit	-	Jenis	5	Unit	5	Unit	-	2	Unit	14	Unit
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	persen	100	persen
2 16 01 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan paket pengiriman	2	Laporan	2	Laporan	2	Jenis	2	Jenis	100	2	Jenis	2	Jenis
2 16 01 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan kebutuhan dasar energi dan air selama satu tahun	12	Laporan	12	Laporan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	Bulan
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset/BMD yang dipelihara	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen
2 16 01 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengurusan perpanjangan surat kendaraan bermotor; Jumlah Liter BBM / Oli yang diadakan; Jumlah jenis suku cadang; Jumlah jenis service	23	Unit	11	Unit	18	Unit	18	Unit	100	24	Unit	23	Unit
2 16 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	20	unit	2	jenis	20	unit	20	unit	100	20	Unit	20	Unit



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024				
			Target	Satuan	Target	Satuan	Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Reali sasi (%)	Target	Satuan	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
												Target	Satuan		Reali sasi	Satuan
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
02 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE INFORMASI PEMERINTAH DAERAH YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAN MEDIA MASSA MITRA KERJA PEMERINTAH	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	
02 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Pemerintah yang di publikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	5	jenis	5	jenis	5	Jenis	5	Jenis	100	5	Jenis	5	Jenis	100
02 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik			4	0	4	Jenis	4	Jenis	100	4	dok	4	dok	100
02 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik			3	0	1	Jenis	1	Jenis	100	1	dok	1	dok	100
02 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik			0	0	1	Kali	1	Kali	100	1	dok	1	dok	100
02 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan			131	0	130	Menara	129	Menara	99	1	dok	1	dok	100
02 16 02 2.01 15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1	Komunitas	0	Komunitas										
02 16 02 2.01 18	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100	Persen	0	Persen										
02 16 02 2.01 21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5	Media	0	Media										
02 16 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE APLIKASI LAYANAN PUBLIK/TATA KELOLAPEMERINTAH YANG DIAKSES	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
		PERSENTASE KETERSEDIAAN JARINGAN INTERNET (BANDWIDTH SERVER) OPD	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
02 16 03 2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah Daerah yang dapat diakses	4	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	4	jenis	100	6	Jenis	10	Jenis	250
		Jumlah Kapasitas Bandwidth Server yang terkoneksi	18	Mbps	15	Mbps	15	Mbps	18	Mbps	120	15	Mbps	18	Mbps	100
02 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik			4	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	100	4	unit	4	unit	100
02 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah jenis layanan publik (Tarakan Call Center)			1	Layanan	2	Layanan	2	layanan	100	2	layanan	2	layanan	100
02 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah			15	Mbps	15	Mbps	18	Mbps	120	3	dok	3	dok	100
02 16 03 2.02 16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1	dok												
02 16 03 2.02 20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2	aplikasi												
02 16 03 2.02 30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	30	PD												
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE DATA SEKTORAL YANG DIPUBLIKASIKAN	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Buku Publikasi Data dan Statistik Daerah	1	jenis	4	jenis	4	Jenis	4	Jenis	100	5	Jenis	4	Jenis	400
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorale Melebihi Pagu Validasi	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral			250	buku	190	dok	90	dok	47	1	dok	1	dok	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024								
			Target	Satuan	Target	Satuan	Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target	Satuan	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024						
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan				Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)		(10)		(11)			
2	20	02	2.01	02	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun		0	buku	60	dok	73	dok	122	3	dok	3	dok	100	
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pelatihan statistik sektoral dari BPS		2	kegiatan	30	orang	30	orang	100	30	org	60	org	200	
2	20	02	2.01	09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100	persen												
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE SOSIALISASI KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	persen	100	100	Persen	100	Persen	100
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Kebijakan keamanan informasi	1	Kegiatan	1	Kegiatan	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100	3	Kegiatan	1	Kegiatan	100
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1	dok	0	dok	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100	1	dokumen	1	dokumen	100
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota			2	0	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	1	Laporan	1	laporan	100
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	laporan	100

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan berdasarkan pada indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Keberhasilan kinerja OPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Untuk urusan Komunikasi dan Informatika, DKISP masih mempunyai pekerjaan yang masih belum terselesaikan yaitu Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan, Meningkatkan akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang merata khususnya di bidang infrastruktur SPBE yang terintegrasi serta layanan SPBE, meningkatnya kapasitas SDM SPBE; adalah pekerjaan yang harus dilakukan DKISP untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut analisis pencapaian indikator kinerja utama pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, yang disesuaikan menurut tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian :

1. Persentase OPD yang terlayani Infrastruktur Jaringan telah mencapai target (100%). Pada tahun 2023 dari target 30 OPD yang terkoneksi bandwidth server dapat terealisasi seluruhnya dengan kapasitas bandwidth sebesar 18 Mbps untuk layanan bandwidth server NOC yang dapat diakses oleh seluruh OPD serta layanan publik Call Center 112.

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

- Adanya peraturan/kebijakan dari Pemerintah Pusat seperti : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
- Visi Kota Tarakan mewujudkan Kota Tarakan yang maju dan sejahtera melalui Smart City sehingga banyak kegiatan/layanan publik yang dilaksanakan dengan sistem elektronik dan tentunya hal ini sangat membutuhkan ketersediaan jaringan dan bandwidth server yang memadai
- Dukungan anggaran dan kebijakan dari Pemerintah Kota yang optimal sehingga Program/Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Persentase kontribusi provider telekomunikasi tidak mencapai target (71,23%). Dari Laporan Realisasi Retribusi Menara Telekomunikasi diperoleh jumlah menara yang melakukan pembayaran retribusi sebanyak 92 menara dari target yang ditetapkan sebanyak 129 menara.

Faktor penyebab kurangnya keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

- Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihapuskan. UU HKPD berlaku terhitung mulai tanggal 5 Januari 2022 yang sekaligus mencabut UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD.

- Akan tetapi, sesuai dengan Ketentuan Peralihan UU HKPD Pasal 187 huruf a dan huruf b, retribusi tersebut masih dapat dipungut sesuai dengan Perda mengenai PDRD berdasarkan UU PDRD yang masih tetap berlaku paling lama 2 tahun sejak tanggal diundangkannya UU HKPD .
 - Atas dasar peraturan diatas beberapa *Provider* dan pemilik menara tidak melakukan pembayaran Retribusi Menara sampai dengan berakhirnya tahun 2023 .
3. Persentase media layanan informasi publik telah mencapai target (100%). Tahun 2023 dari target 5 media layanan informasi yang ada semuanya telah digunakan oleh pemerintah kota untuk menyampaikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat.
- Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :
1. Adanya peraturan/kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah seperti : Undang-undang nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 19 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 2. Sinergitas Pemerintah dan media telah dibangun maksimal untuk mewujudkan pemberitaan yang berimbang dan bertanggungjawab sehingga penerapan layanan informasi melalui media dapat membantu masyarakat untuk memahami informasi kegiatan pembangunan daerah.
 3. Dukungan anggaran dan kebijakan dari Pemerintah Kota yang optimal sehingga layanan informasi dan dokumentasi dapat dilaksanakan dengan baik.
4. Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral mencapai 96,67%. Berdasarkan Laporan Rekapitulasi Data Sektoral Kota Tarakan bahwa OPD yang berkontribusi sebanyak 29 OPD dari

target 30 OPD, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 93,33 %

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

1. Adanya peraturan/kebijakan dari Pemerintah Pusat seperti : Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
2. Dilaksanakannya Forum Komunikasi Statistik Daerah (FKSD) sebagai upaya penyamaan persepsi dalam penyusunan Metadata Variabel Statistik Sektoral
3. Dukungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan sebagai mitra dan penyedia data statistik
5. Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi telah mencapai target (100%). DKISP Kota Tarakan telah merealisasikan 6 aplikasi layanan publik pada Tahun 2023 dari target 6 aplikasi yang ditetapkan/dianggarkan.

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

1. Adanya peraturan/kebijakan dari Pemerintah Pusat seperti : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Nomor Tunggal Panggilan Darurat
2. Visi Kota Tarakan mewujudkan Kota Tarakan yang maju dan sejahtera melalui Smart City sehingga dibutuhkan ketersediaan aplikasi untuk memudahkan layanan dan informasi yang mudah, murah dan cepat kepada masyarakat
3. Dukungan anggaran dan kebijakan dari Pemerintah Kota yang optimal sehingga Program/Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.



6. Nilai/Predikat Sakip telah memenuhi target. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi nilai Sakip DKISP adalah 71,03 atau dengan predikat BB (Sangat Baik) dari target yang ditetapkan sebesar 70/B.

penyebab tercapainya target LHE Sakip antara lain :

1. Penetapan Target Keberhasilan sesuai dengan Indikator Tujuan.
2. Dokumen perencanaan dan keuangan telah dipublikasikan pada Website resmi PD atau Website Pemerintah Kota Tarakan yang dapat memudahkan publik/masyarakat untuk mengakses .
3. Evaluasi internal telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan.
4. Dokumen LKIP telah didukung basis data yang kompeten yang dapat diverifikasi, ditelusuri sumber datanya dan up to date.

Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan disajikan dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut :



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

No	Indikator	Satuan	SPM / Standar Nasional	IKK	Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis		
					2023	2024	2025	2026	2023	2024		2025	2026
1	Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan				100%	100%			100%	100%			
2	Persentase kontribusi provider telekomunikasi				100%	100%			71%				terdapat perubahan peraturan terkait pemungutan retribusi menara
3	Persentase media layanan informasi publik				100%	100%			100%	100%			
4	Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral				100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	
5	Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi				100%	100%	100%		100%	100%			
6	Indeks SPBE						3	3.1	2.92	2.92	3	3.1	
7	Persentase penayangan informasi publik						100%	100%			100%	100%	
8	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi keamanan informasi						100%	100%			100%	100%	
9	Nilai dan predikat SAKIP				70/B	70/B	71.50/BB	71.90/BB	71,03/BB	71,03/BB	71.50/BB	71.90/BB	

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu :

1. Belum adanya sistem informasi terpadu yang mengarah pada *e-Government*;
2. Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah kota maupun PD untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas;
3. Belum optimalnya penyiapan dan pemanfaatan SDM yang berhubungan dengan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Belum optimalnya sarana prasarana atau infostruktur dan infrastruktur bagi penyebarluasan informasi publik, statistik sektoral dan pengamanan informasi pemerintah kota;
5. Belum optimalnya Implementasi kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), baik PPID Utama maupun PPID pembantu di OPD-OPD karena belum terpenuhinya SDM dan fasilitas pendukung;
6. Layanan Tarakan Command Center masih belum optimal karena kendala SDM dan Sarana serta Prasarana pendukung.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dengan arahan kepala daerah terkait



prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan Rancangan Awal RKPD .

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada table T-C.31 berikut



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Tarakan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN ANALISIS		
					6,568,765,000						6,568,765,000		
					6,453,765,000						6,453,765,000		
2	URUSAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
2.16.01	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DKISP	Persentase Layanan Penujangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	4,720,765,000	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DKISP	Persentase Layanan Penujangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	4,979,930,260			
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKISP	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	5,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKISP	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	9,000,000			
2.16.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKISP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	1	laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKISP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	4	laporan	2,000,000	cetak, penggandaan dan makan minum rapat	
2.16.01.2.01.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKISP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKISP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	2,000,000	cetak, penggandaan dan makan minum rapat	
2.16.01.2.01.0	Penyenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DKISP	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	dokumen	Penyenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DKISP	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	dokumen	5,000,000	cetak, penggandaan dan makan minum rapat	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKISP	Persentase layanan administrasi keuangan yang terselesaikan tepat waktu.	100 %	4,020,765,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKISP	Persentase layanan administrasi keuangan yang terselesaikan tepat waktu.	100 %	4,269,930,260			
2.16.01.2.02.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKISP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	org/bln	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKISP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	org/bln	4,207,704,260	Gaji, TPP dan ULP ASN	
2.16.01.2.02.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DKISP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dok	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DKISP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dok	62,226,000	Honorarium Pengelola Keuangan dan Pejabat Penguasaan	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKISP	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	100 %	73,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKISP	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	100 %	79,000,000			
2.16.01.2.06.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKISP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	5	paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKISP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	5	paket	3,000,000	Komponen dan Alat Listrik Kantor	
2.16.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKISP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKISP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	paket	30,000,000	ATK dan Bahan Pembersih	
2.16.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKISP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKISP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	paket	10,000,000	Cetak dan Penggandaan	
2.16.01.2.06.0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKISP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKISP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	6,000,000	makan minum	
2.16.01.2.06.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKISP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	lap	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKISP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	lap	30,000,000	Rakor dalam dan luar provinsi	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	DKISP	Jumlah aset/BMD yang diadakan	2	jenis	40,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	DKISP	Jumlah aset/BMD yang diadakan	2	jenis	40,000,000	
2.16.01.2.07.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKISP	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3	unit	40,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKISP	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3	unit	40,000,000	2 unit laptop, 1 unit printer
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	DKISP	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	100 %	322,000,000	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	DKISP	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	100 %	322,000,000			
2.16.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKISP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	lap	2,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKISP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	lap	2,000,000	materni dan biaya pengiriman
2.16.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKISP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	lap	320,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKISP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	lap	320,000,000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	DKISP	Persentase aset/BMD yang dipelihara	100 %	260,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	DKISP	Persentase aset/BMD yang dipelihara	100 %	260,000,000			
2.16.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKISP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23	unit	240,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKISP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23	unit	240,000,000	BBM, Oli, Pembayaran STNK dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional, Ambulance dan Mobil Jenazah (1 12)
2.16.01.2.09.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKISP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	unit	20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKISP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	unit	20,000,000	Pemeliharaan 20 unit AC dan komputer/pe
02.16.0	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	DKISP	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	100 %	633,000,000	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	DKISP	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	100 %	556,000,000			
02.16.0	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DKISP	Jumlah Informasi Pemerintah yang di publikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah (media massa, media elektronik, media luar ruang, media baru, media interpersonal)	5	jenis	633,000,000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DKISP	Jumlah Informasi Pemerintah yang di publikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah (media massa, media elektronik, media luar ruang, media baru, media interpersonal)	5	jenis	556,000,000	
2.16.02.2.01.1	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	DKISP	Jumlah komunitas informasi yang aktif mendesiminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1	komunitas	8,000,000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	DKISP	Jumlah komunitas informasi yang aktif mendesiminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1	komunitas	8,000,000	Rapat Kelompok Informasi Masyarakat
2.16.02.2.01.1	Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	DKISP	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 %	10,000,000	Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	DKISP	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 %	10,000,000			



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Kode	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN ANALISIS
					RP					RP	
2.16.02.2.01.2.1	Pengelolaan media komunikasi publik	DKISP	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 media	615,000,000	Pengelolaan media komunikasi publik	DKISP	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 media	638,000,000	diseminasi dan publikasi melalui media cetak/ elektronik/ online, pembuatan cover balho, spanduk dan pemeliharaan stand balho
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DKISP	Persentase Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses	100 %	550,000,000	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DKISP	Persentase Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses	100 %	377,834,740	
		DKISP	Persentase ketersediaan jaringan internet (bandwidth server) OPD	100 %	550,000,000		DKISP	Persentase ketersediaan jaringan internet (bandwidth server) OPD	100 %	540,000,000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DKISP	Jumlah Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses	4 jenis	550,000,000	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DKISP	Jumlah Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses	4 jenis	377,834,740	
		DKISP	Jumlah kapasitas bandwidth server yang terkoneksi	18 Mbps	550,000,000		DKISP	Jumlah kapasitas bandwidth server yang terkoneksi	18 Mbps	540,000,000	
2.16.03.2.02.1.0	Penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	DKISP	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional	1 dok	250,000,000	Penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	DKISP	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional	1 dok	227,834,740	uang makan petugas TCC, sewa jalur CCTV, pembelian CCTV outdoor, pemeliharaan jaringan, CCTV dan kelengkapan pendukung TCC
2.16.03.2.02.2.0	Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	DKISP	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 aplikasi	300,000,000	Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	DKISP	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 aplikasi	150,000,000	Master Plan Smart City, Pemeliharaan Aplikasi dan Pengembangan Software Aplikasi
2.16.03.2.02.3.0	Penyediaan akses internet untuk perangkat daerah dalam penyelenggaraan SPBE	DKISP	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	30 PD	550,000,000	Penyediaan akses internet untuk perangkat daerah dalam penyelenggaraan SPBE	DKISP	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	30 PD	540,000,000	Bandwidth 18 Mbps, pemeliharaan NOC dan data center, Sewa lisensi ID Zoom, Sewa domain dan hosting, Sewa Lisensi Panel Web Base
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				80,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				80,000,000	
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DKISP	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	100 %	80,000,000	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DKISP	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	100 %	80,000,000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DKISP	Jumlah Jenis Buku Publikasi Data dan Statistik Daerah	1 jenis	80,000,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DKISP	Jumlah Jenis Buku Publikasi Data dan Statistik Daerah	1 jenis	80,000,000	
2.20.02.2.01.0.9	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	DKISP	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 %	19,498,040	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	DKISP	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 %	19,498,040	retak buku Statistik Sektoral, rapat wali data dan kegiatan FKSD
2.20.02.2.01.1.0	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 dok	54,477,030	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 dok	54,477,030	Satu Data Indonesia (SDI), Monitoring dan evaluasi kopisoka serta honorarium tim
2.20.02.2.01.1.1	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	3 dok	6,024,930	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	3 dok	6,024,930	Penyusunan proses bisnis statistik sektoral
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				35,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				35,000,000	
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	DKISP	Persentase sosialisasi kebijakan keamanan informasi	100 %	35,000,000	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	DKISP	Persentase sosialisasi kebijakan keamanan informasi	100 %	35,000,000	
2.21.02.2.01	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DKISP	Jumlah Sosialisasi keamanan informasi	1 kegiatan	35,000,000	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DKISP	Jumlah Sosialisasi keamanan informasi	1 kegiatan	35,000,000	
2.21.02.2.01.0.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	DKISP	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dok	15,000,000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	DKISP	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dok	15,000,000	rapat penyusunan SOP SOP Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
2.21.02.2.01.0.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	DKISP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 lap	20,000,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	DKISP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 lap	20,000,000	evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Pengumpulan informasi tersebut dapat dilakukan dengan penelitian lapangan keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (kabupaten/kota) .

Berdasarkan hasil Musrenbang tahun 2024 tidak ada usulan program dan kegiatan dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat yang sesuai dan masuk di dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2024.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2023 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2020 – 2024 akan berfokus untuk memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Transformasi Digital) dan memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (Konsolidasi Demokrasi). Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo

Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan

upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai *supply*), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi *demand*).

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet broadband ke seluruh wilayah Indonesia, dan percepatan digitalisasi di semua sektor. Selaras juga dengan arahan Presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional, maka Renstra Kemenkominfo 2020 - 2024 akan fokus pada upaya percepatan transformasi digital nasional. Arah kebijakan dan strategi Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

Tabel 3.1
Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkominfo 2020-2024

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	<ol style="list-style-type: none">1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik;2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (<i>analog switch off</i>), untuk meraih <i>digital dividend</i>; dan3. Farming dan refarming frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.

2	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	<ol style="list-style-type: none">1. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi <i>next broadband</i> (5G);2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman
3	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	<ol style="list-style-type: none">1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan2. Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.
4	Integrasi Pusat Data Nasional dan Transformasi digital pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia (SDI); dan2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait .
6	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir;2. Membangun tim yang solid dan responsive dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan
7	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan <i>smart services</i> , dan inovasi perencanaan penganggaran

Sumber: Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024

Tabel 3.2
Sasaran Strategis dan Program Kemenkominfo 2020 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program
1	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah desa mendapatkan layanan seluler 4G di wilayah 3T dan Non 3T (kumulatif)2. Persentase (%) kec.terjangkau infrastruktur3. Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses <i>fixed broadband</i> terhadap total Rumah Tangga* (kumulatif)4. Kapasitas penyediaan satelit multifungsi (SATRIA 1&2) (Gbps)*5. Persentase (%) rasio harga layanan <i>fixed broadband</i> terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)*6. Persentase (%) rasio harga layanan <i>fixed broadband</i> terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan <i>up to 30 Mbps</i>)*	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
2	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;	Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran TV digital* (kumulatif)	
3	Meningkatnya konektivitas layanan pos	Persentase (%) cakupan populasi penyiaran TV digital* (kumulatif)	
4	Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation Broadband Nasional</i> ;	Jumlah lokasi yang terkoneksi 5G pada tahap awal implementasi	

5	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Penambahan spektrum frekuensi radio (kumulatif)*2. Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit)*3. Persentase (%) penyelesaian laboratorium balai besar pengujian perangkat telekomunikasi sebagai lab rujukan nasional* (kumulatif)4. Jumlah dokumen standar teknis sebagai pendukung sertifikasi perangkat pos dan informatika5. Jumlah capaian PNBP bidang pos dan informatika6. Indeks kepuasan publik terhadap layanan publik Kemenkominfo	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik
6	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase (%) tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis dan kawasan prioritas (kumulatif) :<ol style="list-style-type: none">a. Pertanianb. Pariwisatac. Logistikd. Maritime. Pendidikanf. Kesehatan2. Jumlah UMKM yang <i>scale up</i> dari usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah dengan adopsi teknologi digital* (kumulatif)3. Jumlah penambahan <i>unicorn</i> (kumulatif)*4. Jumlah startup digital aktif yang terbentuk (kumulatif)*5. Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019	



		6. Persentase (%) Implementasi UU PDP (kumulatif) 7. Persentase (%) ketersediaan riset dan penelitian bidang TIK	
7	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;	1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi bidang TIK (kumulatif)* 2. Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital	
8	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	1. Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional 2. Persentase (%) instansi yang memanfaatkan aplikasi generik yang dikembangkan secara <i>multiplatform</i> (kumulatif) 3. Jumlah Kab/Kota di kawasan prioritas (5 kawasan super prioritas dan 1 kawasan IKN) yang mengimplementasikan Smart City (kumulatif)	
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas daerah	
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1–5) 2. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkominfo 3. Nilai opini laporan keuangan Kemenkominfo menurut kriteria 4. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemenkominfo 5. Indeks kompetensi pegawai Kemenkominfo	

Sumber: Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2023 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kota Tarakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2024	2025
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan internet (bandwidth server)	100 %	100 %
	Meningkatnya penayangan informasi publik	Persentase penayangan informasi publik	na	100 %
	Meningkatnya akses dan diseminasi komunikasi dan informasi yang merata	Indeks Pembangunan Statistik	1,06	2,5
	Meningkatnya sosialisasi keamanan informasi	Persentase PD yang mendapatkan sosialisasi keamanan informasi	100 %	100 %
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKISP	Nilai dan predikat SAKIP	70/B	71,50/BB

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C 33 berikut :



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Tarakan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
2.	URUSAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				6,568,765,000			7,219,884,164	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6,453,765,000			7,104,884,164	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	DKISP	100 %	4,979,930,260		100 %	5,371,884,164	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	DKISP	1 dok	9,000,000		1 dok	9,000,000	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKISP	4 laporan	2,000,000		1 laporan	2,000,000	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKISP	4 laporan	2,000,000		1 laporan	2,000,000	
2.16.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DKISP	1 dokumen	5,000,000		1 dokumen	5,000,000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan yang terselesaikan tepat waktu.	DKISP	100 %	4,269,930,260		100 %	4,661,884,164	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKISP	28 org/bln	4,207,704,260		30 org/bln	4,597,558,164	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DKISP	12 dok	62,226,000		12 dok	64,326,000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	DKISP	100 %	79,000,000		100 %	79,000,000	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	DKISP	5 paket	3,000,000		5 paket	3,000,000	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKISP	35 paket	30,000,000		35 paket	30,000,000	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKISP	3 paket	10,000,000		3 paket	10,000,000	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKISP	1 laporan	6,000,000		1 laporan	6,000,000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKISP	5 lap	30,000,000		4 lap	30,000,000	



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	DKISP	2 jenis	40,000,000			2 jenis	40,000,000
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	DKISP	3 unit	40,000,000			3 unit	40,000,000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	DKISP	100 %	322,000,000			100 %	322,000,000
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKISP	2 lap	2,000,000			2 lap	2,000,000
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DKISP	12 lap	320,000,000			12 lap	320,000,000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset/BMD yang dipelihara	DKISP	100 %	260,000,000			100 %	260,000,000
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DKISP	23 unit	240,000,000			23 unit	240,000,000
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	DKISP	20 unit	20,000,000			20 unit	20,000,000
02.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	DKISP	100 %	556,000,000			100 %	633,000,000
02.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Pemerintah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah (media massa, media elektronik, media luar ruang, media baru, media interpersonal)	DKISP	5 jenis	556,000,000			5 jenis	633,000,000
2.16.02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah komunitas informasi yang aktif mendesiminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	DKISP	1 komunitas	8,000,000			1 komunitas	8,000,000
2.16.02.2.01.18	Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	DKISP	100 %	10,000,000			100 %	10,000,000
2.16.02.2.01.21	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	DKISP	5 media	538,000,000			5 media	615,000,000
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses	DKISP	100 %	377,834,740			100 %	550,000,000
		Persentase ketersediaan jaringan internet (bandwidth server) OPD	DKISP	100 %	540,000,000			100 %	550,000,000



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses	DKISP	4 jenis	377,834,740			4 jenis	550,000,000
		Jumlah kapasitas bandwidth server yang terkoneksi	DKISP	18 Mbps	540,000,000			18 Mbps	550,000,000
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional	DKISP	1 dok	227,834,740			1 dok	250,000,000
2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	DKISP	2 aplikasi	150,000,000			2 aplikasi	300,000,000
2.16.03.2.02.30	Penyediaan akses internet untuk perangkat daerah dalam penyelenggaraan SPBE	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	DKISP	30 PD	540,000,000			30 PD	550,000,000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				80,000,000				80,000,000
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	DKISP	100 %	80,000,000			100 %	80,000,000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Buku Publikasi Data dan Statistik Daerah	DKISP	1 jenis	80,000,000			1 jenis	80,000,000
2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	DKISP	100 %	19,498,040			100 %	19,498,040
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	DKISP	1 dok	54,477,030			1 dok	54,477,030
2.20.02.2.01.11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	DKISP	3 dok	6,024,930			3 dok	6,024,930
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				35,000,000				35,000,000
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sosialisasi kebijakan keamanan informasi	DKISP	100 %	35,000,000			100 %	35,000,000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi keamanan informasi	DKISP	1 kegiatan	35,000,000			1 kegiatan	35,000,000
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang Ditetapkan	DKISP	1 dok	15,000,000			1 dok	15,000,000
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	DKISP	1 lap	20,000,000			1 lap	20,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan mengampu Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan dan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan tahun 2025 akan melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dengan total anggaran 6.568.765.000 anggaran tersebut digunakan untuk mendukung 3 urusan, 5 program, 10 kegiatan dan 26 Sub kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program/kegiatan/subkegiatan yaitu Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan dan lingkup Kota Tarakan.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini :



Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Kota Tarakan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RENCANA TAHUN 2025			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
2.	URUSAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				6,568,765,000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6,453,765,000	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	DKISP	100 %	4,979,930,260	
2.16.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	DKISP	1 dok	9,000,000	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKISP	4 laporan	2,000,000	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKISP	4 laporan	2,000,000	
2.16.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DKISP	1 dokumen	5,000,000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan yang terselesaikan tepat waktu.	DKISP	100 %	4,269,930,260	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKISP	28 org/bln	4,207,704,260	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DKISP	12 dok	62,226,000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	DKISP	100 %	79,000,000	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik.Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	DKISP	5 paket	3,000,000	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKISP	40 paket	30,000,000	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DKISP	3 paket	10,000,000	
2.16.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	DKISP	1 laporan	6,000,000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKISP	5 lap	30,000,000	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	DKISP	2 jenis	40,000,000	
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	DKISP	3 unit	40,000,000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	DKISP	100 %	322,000,000	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKISP	2 lap	2,000,000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DKISP	12 lap	320,000,000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset/BMD yang dipelihara	DKISP	100 %	260,000,000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DKISP	23 unit	240,000,000	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	DKISP	20 unit	20,000,000	



Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RENCANA TAHUN 2025			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
02.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	DKISP	100 %	556,000,000	
02.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Pemerintah yang di publikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah (media massa, media elektronik, media luar ruang, media baru, media interpersonal)	DKISP	5 jenis	556,000,000	
2.16.02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah komunitas informasi yang aktif mendesiminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	DKISP	1 komunitas	8,000,000	
2.16.02.2.01.18	Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	DKISP	100 %	10,000,000	
2.16.02.2.01.21	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	DKISP	5 media	538,000,000	
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses	DKISP	100 %	377,834,740	
		Persentase ketersediaan jaringan internet (bandwidth server) OPD	DKISP	100 %	540,000,000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Layanan Publik/Tata Kelola Pemerintah yang dapat diakses	DKISP	4 jenis	377,834,740	
		Jumlah kapasitas bandwidth server yang terkoneksi	DKISP	18 Mbps	540,000,000	
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional	DKISP	1 dok	227,834,740	
2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	DKISP	2 aplikasi	150,000,000	
2.16.03.2.02.30	Penyediaan akses internet untuk perangkat daerah dalam penyelenggaraan SPBE	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	DKISP	30 PD	540,000,000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				80,000,000	
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	DKISP	100 %	80,000,000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Buku Publikasi Data dan Statistik Daerah	DKISP	1 jenis	80,000,000	
2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	DKISP	100 %	19,498,040	
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	DKISP	1 dok	54,477,030	
2.20.02.2.01.11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	DKISP	3 dok	6,024,930	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				35,000,000	
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sosialisasi kebijakan keamanan informasi	DKISP	100 %	35,000,000	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi keamanan informasi	DKISP	1 kegiatan	35,000,000	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang Ditetapkan	DKISP	1 dok	15,000,000	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	DKISP	1 lap	20,000,000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika dan RKPD Kota Tarakan, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2025.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan .

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian maupun di lingkup daerah.

Dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan diperlukan sinergitas semua pihak terkait dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Diharapkan melalui Rencana Kerja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang semakin



komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan semakin terfokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Kota Tarakan.